



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Rabu, 7 Januari 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI



Bupati Subandi Bicara tentang Infrastruktur Prioritas Tahun Ini Pemkab Siapkan Rp 200 Miliar untuk Pembebasan Lahan Flyover Gedangan

Pemkab Sidoarjo telah mengalokasikan anggaran Rp 200 miliar untuk pembebasan lahan flyover Gedangan. Bupati Subandi mengatakan, pembangunan infrastruktur prioritas tahun ini akan difokuskan pada pembebasan lahan untuk flyover tersebut. "Kita akan mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan flyover Gedangan. Ini adalah prioritas utama kita tahun ini," kata Subandi. "Kita akan mengalokasikan anggaran Rp 200 miliar untuk pembebasan lahan flyover Gedangan. Ini adalah prioritas utama kita tahun ini."



Gedung Parkir Double Deck RSUD Dioperasikan Pekan Depan

Berkapasitas 170 Mobil
Sidoarjo - Pembangunan gedung parkir double deck RSUD Notojoso hampir tuntas. Saat ini, progres proyek telah mencapai 90 persen. Gedung parkir ini akan dioperasikan pekan depan. "Kita akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung parkir ini. Ini adalah prioritas utama kita tahun ini," kata Bupati Subandi.



Satpol PP Tertibkan 38 Reklame Melanggar Aturan

KOTA-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo menertibkan puluhan reklame insidentil di sejumlah ruas jalan utama. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menegakkan aturan penyelenggaraan reklame sekaligus menjaga ketertiban serta keselamatan masyarakat. Sejumlah ruas jalan yang menjadi sasaran penertiban antara lain Jalan Raya Ahmad Yani, Jalan Raya Jenggolo, Jalan Raya Buduran, Jalan Raya Raya Tebel, dan Jalan Raya Seruni, Jalan Raya Gedangan, Jalan Raya Arah, Jalan Raya Brigen, Katamsu Waru, Jalan Raya Ali Mas'ud, hingga Jalan Raya Waru. Dalam kegiatan tersebut, petugas menertibkan sebanyak 38 reklame komersial.

56 Rumah Berdiri di Aset Pemerintah, Kejari Minta Klarifikasi Camat

Pemilik Bakal Dikenai Sistem Sewa
SIDOARJO - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroiti keberadaan 56 rumah di tanah aset milik Pemkab Sidoarjo yang berlokasi di Kecamatan Taman. Aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo turun tangan dengan memeriksa pihak-pihak terkait. Ada kesepakatan bahwa persoalan dituntaskan dengan mekanisme sewa. Kasi Intel Kejari Sidoarjo Hadi Supripto tak menampik soal adanya pemeriksaan terkait tanah milik Pemkab. Namun perkara penyelidikan dihentikan karena sudah ada upaya Pemkab menindaklanjuti masalah. "Iya. Memang sempat ada," katanya. Kejaksan dikabarkan sempat memanggil Camat Taman untuk klarifikasi. Dia ditanya kronologi adanya lahan pemerintah yang disalahgunakan. Termasuk bagaimana asal usul 56 rumah yang berdiri di eks TKD. Tunggu Penilaian Appraisal Camat Taman Arie Prabowo menegakkan jika Kejari

HUNIAN DI ASSET PEMERINTAH

- Ada 56 rumah yang berdiri di lahan aset
- Hunian sudah dibangun bertahun-tahun
- Pemkab akan menerapkan sistem sewa
- Pemilik bersedia pindah jika lahan diminta pemerintah

Penyalahgunaan: Pemkab bakal menerapkan sistem sewa bagi pemilik hunian tak berizin di Kecamatan Taman.

Evaluasi Internal
Bupati Sidoarjo Subandi mengaku bakal mengevaluasi internalnya mengenai masalah tersebut. Menurut dia, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya ketegasan dan pengawasan sejak awal. Subandi mengaku telah berdialog dengan para pemilik bangunan untuk mencari solusi yang adil dan sesuai ketentuan hukum. (eza/fu/hen)

Proyek Betonisasi Jalan Tambaksawah-Tambakrejo Rampung

Motor Bisa Melintas Mulai 20 Januari
PROYEK betonisasi Jalan Desa Tambaksawah-Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, kini memasuki tahap akhir. Jalan penghubung vital antardesa tersebut telah rampung dikerjakan dan hanya menyisakan proses pengeringan beton sebelum dibuka sepenuhnya untuk umum. Pantauan Radar Sidoarjo di lokasi menunjukkan, meski belum dibuka secara resmi, sejumlah kendaraan roda dua sudah mulai melintas di atas jalan beton baru tersebut. Namun, pihak kontraktor menegaskan bahwa pelepasan jalan akan dilakukan secara bertahap demi menjaga mutu dan kekuatan konstruksi. Pelaksanaan proyek, Ramadhan, memastikan bahwa secara teknis pekerjaan utama telah selesai. Saat ini, pengerjaan hanya menyisakan bagian berornamen atau bibir jalan. bisa dikatakan 100 persen selesai. Tinggal menunggu umur beton saja. (Ke Halaman 10)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Bupati Subandi Bicara tentang Infrastruktur Prioritas Tahun Ini

Pemkab Siapkan Rp 200 Miliar untuk Pembebasan Lahan Flyover Gedangan

Pemkab Sidoarjo bakal melanjutkan sejumlah proyek strategis tahun ini. Selain pembangunan RSUD Sedayu, Pemkab juga akan memulai pembebasan lahan flyover (FO) Gedangan. Progres pembangunan flyover disampaikan Bupati Subandi saat berkunjung ke Kantor Redaksi Jawa Pos kemarin (5/11).

Bagaimana persiapan pembangunan flyover? Kami sudah memasukkan anggaran untuk pembebasan lahan pada APBD 2026. Tentu, persoalan lahan diharapkan tuntas secepatnya.

Bagaimana nilai yang disiapkan? Untuk perencanaan kita siapkan Rp 200 miliar. Secara

detail, anggaran berada di APBD.

Bagaimana luas lahan yang akan dilebebaskan?

Ada sekitar 800 meter panjang jalan untuk flyover yang harus dilebebaskan. Saat ini masih ditunda karena menunggu proses

Rencana pembangunan? Sudah terakumulasi

untuk diuraikan. Proses flyover, memang terdapat realisasi proyek. Tapi proyek pembangunan sudah dilakukan tahun 2027.

Upaya Pemkab untuk mendukung pembangunan?

Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai pembangunan. Ini proyek strategis yang perlu dikawal bersama.

Bagaimana terkait pembangunan flyover?

FO Gedangan saat ini sudah selesai pembebasan lahan. Untuk lebar 100 meter, tinggi 10 meter, 10 meter. Kemudian akan dibangun jembatan. Kemudian pengangkutan yang melintasi jembatan. Itu akan selesai. (Ben)

Jawa Pos



ANGGER BONDAN JAWA POS

MAKIN LUAS:
Gedung parkir
RSUD RT Notopuro
siap dioperasikan
untuk kendaraan
pengunjung rumah
sakit.

Gedung Parkir Double Deck RSUD Dioperasikan Pekan Depan

Berkapasitas 170 Mobil

SIDOARJO – Pembangunan gedung parkir *double deck* RSUD RT Notopuro hampir tuntas. Saat ini, progres proyek telah mencapai 98 persen dan tinggal finishing. Rencananya, fasilitas bakal dioperasikan pekan depan.

Direktur RSUD RT Notopuro dr Atok Irawan mengatakan, peresmian di-

rencanakan bebarengan dengan rangkaian Hari Jadi Sidoarjo. Pengerjaan tinggal area depan dan pagar. "Sudah pengerjaan akhir," katanya.

Pembangunan gedung parkir bertingkat diharapkan memperluas fasilitas parkir. Targetnya mampu menambah kapasitas parkir hingga 170 kendaraan roda empat.

Dr Atok memastikan operasional rumah sakit tetap berjalan normal selama proses akhir. Selain parkir, rumah sakit juga mempercepat ko-

neksi saluran drainase baru. Hal tersebut untuk mencegah kembali terjadinya genangan masuk ke rumah sakit.

"Sistem drainase di sekitar IGD saat ini jauh lebih lebih baik karena drainase yang baru sudah terhubung," ujarnya. Penguatan infrastruktur itu ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pasien. "Drainase yang baik risiko banjir di lingkungan rumah sakit dapat ditekan secara permanen," imbuhnya. (ful/hen)

Jawa Pos

PAD Lampau Target, Pendapatan Parkir Belum Maksimal

KOTA Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 mencatatkan hasil menggembirakan. Dari target sebesar Rp 2 triliun 691 miliar, realisasi PAD berhasil melampaui target dengan capaian Rp 2 triliun 721 miliar. Meski demikian, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan tidak ingin cepat berpuas diri.

Bupati Subandi meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah agar capaian PAD ke depan dapat

meningkat lebih signifikan.

"Keberhasilan ini kami harap bisa terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada," ujar Subandi, Senin (5/1).

Menurutnya, selama ini kontribusi PAD masih didominasi oleh sektor pajak daerah. Padahal, sektor retribusi daerah juga memiliki potensi besar untuk menopang pendapatan daerah jika dikelola secara maksimal dan profesional.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian khusus adalah retribusi parkir. Subandi menilai,

• Ke Nalaman 10



ARAHAN: Bupati Sidoarjo Subandi berdiskusi dengan Kepala OPD berkesempatan untuk peningkatan PAD.



PAD Lampau Target,...

pendapatan parkir yang saat ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal.

"Dari Dinas Perhubungan, pendapatan parkirnya belum maksimal. Mohon ini terus ditingkatkan. Demikian juga dinas-dinas lain, kami harap bisa lebih maksimal," tegasnya saat memberikan arahan di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Sidoarjo.

Meski target PAD telah tercapai,

Subandi menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam pengelolaan retribusi daerah. Ia meminta agar pengelolaan parkir dibenahi secara menyeluruh, termasuk melalui penerapan sistem digital.

"Pengelolaan parkir harus dilakukan dengan lebih baik. Digitalisasi parkir perlu diterapkan agar lebih tertib, transparan, dan mampu meningkatkan pendapatan daerah," pungkasnya. (dik/vga)



Banjir Dua Bulan, Warga Kedunghanteng Terancam Terkena Gangguan Kulit



Dinkes Turunkan Layanan Kesehatan

TANGGUNG JAWAB penanganan banjir yang tak kunjung surut di Desa Kedunghanteng, Kecamatan Tanggulangen, Kabupaten Sidoarjo, mulai berdampak secara langsung kesehatan warga. Hampir dua bulan terendam sejak banjir tak surut, banjir dengan ketinggian 1-2 meter ini membuat masyarakat mulai merasa berbagai penyakit, terutama gangguan kulit.

Dua Bulan ini, air sudah mencapai ketinggian 1-2 meter, masyarakat di sini mulai merasa berbagai penyakit, terutama gangguan kulit. Akibatnya, masyarakat mulai merasa berbagai penyakit, terutama gangguan kulit.

kesehatan terus meningkat seiring besarnya genangan.

Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mulai menurunkan layanan kesehatan keliling ke wilayah terdampak banjir. Kepala Dinas Kesehatan dr. Lakhsmie Hidayat Yuniyanti mengatakan, pelayanan kesehatan dibatasi karena tidak dapat mematuhi standar kesehatan lapangan.

Tim Puskesmas sangat kawatir memberikan pelayanan kesehatan karena air yang terdampas banjir, air di rumah-rumah.

Akibatnya, untuk itu harus tetap dapat diterima dan ambalan, petanah.

dr. Lakhsmie Hidayat



Banjir Dua Bulan,...

melakukan pelayanan keliling menggunakan ambulans. Sementara itu, di lokasi yang masih tergenang air cukup tinggi, Dinkes Sidoarjo berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menjangkau warga menggunakan perahu karet.

"Untuk lokasi dengan genangan tinggi, kami bekerja sama dengan BPBD agar pelayanan pengobatan tetap bisa menjangkau warga," terangnya.

Selain pelayanan kesehatan, Dinkes Sidoarjo juga menyalurkan bantuan berupa biskuit bagi balita dan anak-anak. dr. Lakhsmie menyebutkan, penyakit kulit menjadi keluhan

terbanyak yang dialami warga terdampak banjir, baik anak-anak maupun orang dewasa. Kondisi lingkungan yang lembap serta air banjir yang tercemar menjadi faktor utama pemicu penyakit tersebut.

"Saat ini keluhan yang paling banyak adalah penyakit kulit. Pelayanan kesehatan kami lakukan secara mobile di

desa-desa terdampak banjir," jelasnya.

Untuk mendukung layanan tersebut, tenaga kesehatan disiagakan di setiap desa. Setiap desa ditangani oleh dua tenaga kesehatan, sementara jumlah tim kesehatan keliling disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

dr. Lakhsmie juga mengimbau warganya agar tetap menjaga kebersihan diri selama banjir berlangsung.

"Kami mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan dan segera memeriksakan diri jika mengalami keluhan seperti gatal-gatal, ruam, atau luka pada kulit. Penanganan sejak dini sangat penting agar tidak berkembang menjadi infeksi," tegasnya. (dik/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



AMAN: Tanah Kas Desa (TKD) di Kelurahan Taman, Kecamatan Taman.

Kejari Hentikan Penyelidikan Polemik 56 Rumah di TKD Taman

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Sidoarjo menghentikan proses penyelidikan terkait polemik keberadaan 56 rumah yang berdiri di atas Tanah Kas Desa (TKD) di Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Sidoarjo, Hadi Sucipto, membenarkan bahwa sebelumnya sempat dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait persoalan tersebut. Namun, berdasarkan informasi dari Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), proses penyelidikan kini telah dihentikan.

“Iya, benar sempat ada pemeriksaan. Tapi informasi terakhir dari Pidsus, penyelidikannya sudah dihentikan,” ujar Hadi Sucipto.

Ia menjelaskan, sebelum penghentian penyelidikan, Camat Taman beserta sejumlah perangkat kecamatan dan kelurahan sempat dimintai keterangan. Pemeriksaan tersebut dihentikan setelah dilakukan audiensi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kejari Sidoarjo, dan para pemilik rumah yang berdiri di atas

● Ke Halaman 10



Kejari Hentikan...

lahan TKD. Sementara itu, Camat Taman Arie Prabowo menegaskan bahwa Kejari Sidoarjo hanya melakukan klarifikasi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai adanya aset Pemkab Sidoarjo yang dimanfaatkan sebagai permukiman. “Hanya sebatas permintaan klarifikasi dan keterangan saja,” ujarnya.

Arie mengungkapkan bahwa pada bulan lalu telah digelar pertemuan yang melibatkan pemilik 56 rumah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, serta Kejari Sidoarjo. Dari hasil

pertemuan terakhir antara Bupati Sidoarjo, Kejari Sidoarjo, dan pemerintah kecamatan, disepakati bahwa persoalan 56 rumah warga yang berdiri di atas eks TKD diselesaikan melalui mekanisme sewa.

Saat ini, lanjut Arie, proses penilaian appraisal atau penentuan nilai aset masih dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo.

“Penilaian appraisal dilakukan untuk jangka waktu 10 tahun ke belakang dan 10 tahun ke depan. Warga sudah menyepakati pola sewa, namun besaran biayanya masih

menunggu hasil appraisal,” jelasnya.

Sebanyak 56 rumah tersebut berada di belakang Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kelurahan Taman. Kondisi bangunan sebagian besar telah bersifat permanen dan berdiri sejak puluhan tahun lalu. Arie menambahkan, para warga juga telah menandatangani surat pernyataan bermaterai yang mengakui bahwa rumah mereka berdiri di atas eks TKD. “Mereka juga bersedia meninggalkan lokasi tanpa ganti rugi apabila lahan tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah,” pungkasnya. (sur/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



SURYANTO RADAR SIDOARJO

TEGAS: Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menertibkan puluhan reklame insidental di sejumlah ruas jalan utama.

Satpol PP Tertibkan 38 Reklame Melanggar Aturan

KOTA-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo menertibkan puluhan reklame insidental di sejumlah ruas jalan utama. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menegakkan aturan penyelenggaraan reklame sekaligus menjaga ketertiban serta keselamatan

masyarakat.

Sejumlah ruas jalan yang menjadi sasaran penertiban antara lain Jalan Raya Ahmad Yani, Jalan Raya Jenggolo, Jalan Raya Buduran, Jalan Raya Tebel, Jalan Raya Seruni, Jalan



Raya Gedangan, Jalan Raya Aloha, Jalan Raya Brigjen Katamso Waru, Jalan Raya Ali Mas'ud, hingga Jalan Raya Pagerwojo.

Dalam kegiatan tersebut, petugas menertibkan sebanyak 38 reklame komersial.

Dari jumlah itu, 13 reklame diketahui masa izin atau pajaknya telah habis, 23 reklame tidak membayar pajak, satu reklame dalam kondisi rusak, dan satu reklame dipindahkan karena tidak sesuai ketentuan. Adapun jenis reklame yang

● Ke Halaman 10



Satpol PP Tertibkan...

divertikan terdiri atas 28 banner, tujuh spanduk, dan tiga balibo.

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Sidoarjo, R. Novianto Kevsino, mengatakan penertiban ini merupakan bagian dari penegakan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81

Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

"Penertiban reklame kami lakukan secara rutin dan insidental untuk memastikan seluruh penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sidoarjo sesuai aturan. Selain aspek perizinan dan pajak, kami juga memperhatikan faktor keselamatan karena reklame yang

rusak berpotensi membahayakan pengguna jalan," ujar Novianto.

Selain reklame komersial, petugas juga mengevakuasi satu balibo cukai rokok DBH-HT milik Bea Cukai berukuran 3x10 meter yang ditemukan dalam kondisi rusak. Balibo tersebut diketahui melet di atas lampu penerang-

an jalan sehingga berpotensi menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan.

"Untuk balibo cukai rokok yang rusak, kami langsung lakukan evakuasi karena kondisinya membahayakan. Selanjutnya, balibo dibawa ke Mako Satpol PP dan diserahkan kepada staf bidang penegakan peraturan daerah."

imbuhnya.

Satpol PP Kabupaten Sidoarjo mengimbau para pelaku usaha dan penyelenggara reklame agar selalu mematuhi ketentuan perizinan, membayar pajak sesuai aturan, serta memperhatikan kondisi fisik reklame demi keselamatan bersama. (dik/vga)





DIKIR SANGSIR PADAR SIDOARJO

RAMPUNG: Proyek betonisasi Jalan Tambaksawah-Tambakrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, tinggal menyisakan pengerjaan bibir jalan.

Proyek Betonisasi Jalan Tambaksawah- Tambakrejo Rampung

Motor Bisa Melintas Mulai 20 Januari

PROYEK betonisasi Jalan Desa Tambaksawah-Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, kini memasuki tahap akhir. Jalan penghubung vital antardesa tersebut telah rampung dikerjakan dan

hanya menyisakan proses pengeringan beton sebelum dibuka sepenuhnya untuk umum.

Pantauan Radar Sidoarjo di lokasi menunjukkan, meski belum dibuka secara resmi, sejumlah kendaraan roda dua sudah mulai melintas di atas jalan beton baru tersebut. Namun, pihak kontraktor menegaskan bahwa pembukaan jalan akan dilakukan secara bertahap demi menjaga mutu dan kekuatan konstruksi.

Pelaksana proyek, Ramadhan, memastikan bahwa secara teknis pekerjaan utama telah selesai. Saat ini, pengerjaan hanya menyisakan bagian berem atau bibir jalan.

“Alhamdulillah, secara teknis sudah bisa dikatakan 100 persen selesai. Tinggal menunggu umur beton saja,

● Ke Halaman 10



Proyek Betonisasi...

sesuai dengan tanggal yang kami janjikan kepada Bupati Sidoarjo,” ujar Ramadhan kepada Radar Sidoarjo, Selasa (6/1).

Ia menjelaskan, beton membutuhkan waktu tertentu untuk mencapai kekuatan maksimal. Untuk kendaraan roda dua, jalan sudah aman dilintasi setelah beton berumur 14 hari. Sementara itu, kendaraan roda empat dan kendaraan bermuatan berat baru diperbolehkan melintas

setelah beton berumur 28 hari.

“Umur beton 28 hari untuk mobil dan kendaraan bermuatan. Kalau sepeda motor aman di umur 14 hari. Jadi, sepeda motor sudah boleh melintas mulai Selasa, 20 Januari 2026. Sedangkan mobil baru diperbolehkan melintas mulai Selasa, 3 Februari 2026,” jelasnya.

Ia berharap masyarakat dapat bersabar dan mematuhi ketentuan tersebut agar kualitas jalan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. (dik/vga)



ANGGER BONDAN JAWA POS

MAKIN LUAS:
Gedung parkir
RSUD RT Notopuro
siap dioperasikan
untuk kendaraan
pengunjung rumah
sakit.

Gedung Parkir Double Deck RSUD Dioperasikan Pekan Depan

Berkapasitas
170 Mobil

SIDOARJO - Pembangunan gedung parkir *double deck* RSUD RT Notopuro hampir tuntas. Saat ini, progres proyek telah mencapai 98 persen dan tinggal finishing. Rencananya, fasilitas bakal dioperasikan pekan depan.

Direktur RSUD RT Notopuro dr Atok Irawan mengatakan, peresmian di-

rencanakan bebarengan dengan rangkaian Hari Jadi Sidoarjo. Pengerjaan tinggal area depan dan pagar. "Sudah pengerjaan akhir," katanya.

Pembangunan gedung parkir bertingkat diharapkan memperluas fasilitas parkir. Targetnya mampu menambah kapasitas parkir hingga 170 kendaraan roda empat.

Dr Atok memastikan operasional rumah sakit tetap berjalan normal selama proses akhir. Selain parkir, rumah sakit juga mempercepat ko-

neksi saluran drainase baru. Hal tersebut untuk mencegah kembali terjadinya genangan masuk ke rumah sakit.

"Sistem drainase di sekitar IGD saat ini jauh lebih lebih baik karena drainase yang baru sudah terhubung," ujarnya. Penguatan infrastruktur itu ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pasien. "Drainase yang baik risiko banjir di lingkungan rumah sakit dapat ditekan secara permanen," imbuhnya. (ful/hen)

Deteksi aktif dilakukan melalui mobile *Voluntary Counseling and Testing* (VCT) dan perluasan jejaring layanan kesehatan.”



dr Lakhsmie Herawati Yuwantina
Plt Kepala Dinkes Sidoarjo

Setahun, Dinkes Temukan 651 Kasus HIV Baru

SIDOARJO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo berupaya mencegah penularan kasus HIV. Melalui puskesmas, dinkes gencar melakukan deteksi dini pada masyarakat yang rentan terkena penyakit tersebut.

Selama 2025, dinkes mencatat adanya temuan 651 kasus baru. Sebanyak 93 kasus di antaranya ditemukan pada pasien tuberkulosis (TBC) melalui skrining terpadu HIV-TBC. Plt Kepala Dinkes Sidoarjo dr Lakhsmie Herawati Yuwantina mengatakan

jika pengecekan penyakit tidak hanya mengandalkan pemeriksaan pasif.

“Deteksi aktif dilakukan melalui mobile *Voluntary Counseling and Testing* (VCT) dan perluasan jejaring layanan kesehatan,” kata Lakhsmie. Dia mendorong puskesmas untuk melakukan skrining secara humanis. “Seluruh puskesmas dan rumah sakit kami minta untuk menjaga kerahasiaan pasien dan menghilangkan stigma negatif,” pungkas Lakhsmie. **(ful/hen)**



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Pengadilan Agama Sidoarjo.

3.408 Perceraian Dikabulkan PA Sidoarjo

Istri Paling Banyak Menggugat

Sidoarjo – HARINA BANGSA

Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo mengabulkan 3.408 perkara perceraian sepanjang tahun 2025. Dari ribuan perkara tersebut, cerai gugat yang diajukan pihak istri masih mendominasi, dengan penyebab utama konflik rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus.

Panitera Muda Hukum PA Sidoarjo, Bayu Endragupta mengatakan, dari total perkara perceraian yang dikabulkan majelis hakim, 2.591 perkara merupakan cerai gugat, sementara 817 perkara lainnya cerai talak. "Dari awal tahun, memang kebanyakan pihak perempuan yang mengajukan gugatan cerai," ujar Bayu kepada

da wartawan, Selasa (6/1/2025).

Bayu menjelaskan, sepanjang tahun 2025 PA Sidoarjo menangani 3.481 perkara cerai gugat, terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara baru yang masuk sebanyak 3.316 perkara.

"Tidak semua gugatan cerai dikabulkan. Ada yang berujung perdamaian, ada juga yang ditolak karena alasan gugatan tidak cukup kuat," jelasnya.

Sementara itu, untuk perkara cerai talak, tercatat sebanyak 1.196 perkara, dengan 1.112 perkara di antaranya merupakan perkara baru. Dari jumlah tersebut, majelis hakim mengabulkan 817 perkara cerai talak.

Menurut Bayu, pengajuan perceraian di PA Sidoarjo didominasi oleh karyawan swasta dan buruh, serta banyak diajukan oleh pasangan berusia

di bawah 40 tahun atau yang menikah di usia relatif muda.

Berdasarkan data rekap penyebab perceraian, faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi alasan paling dominan dengan 3.346 perkara. "Cekcok urusan rumah tangga, perbedaan prinsip, hingga beda visi dalam membina keluarga masuk dalam kategori perselisihan yang berkepanjangan," imbuh Bayu.

Penyebab lainnya jumlahnya jauh lebih kecil, seperti meninggalkan salah satu pihak sebanyak 88 perkara. Sementara faktor lain seperti poligami dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masing-masing hanya tercatat satu perkara. "Selain perselisihan, penyebab terbanyak kedua adalah ditinggalkan tanpa kabar maupun tanpa nafkah," pungkasnya. (md/rus)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

di Sidoarjo Belajar Daring Gegara Sekolah Banjir

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Sudah hampir dua bulan halaman dan akses menuju SD Negeri Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, tergenang banjir. Kondisi tersebut membuat proses belajar mengajar terpaksa dilakukan secara daring, meski sebagian siswa mengaku lebih senang belajar tatap muka di sekolah.

Salah satunya dirasakan oleh Rizki Yawalludin, siswa kelas V SD Negeri Kedungbanteng. Rizki mengaku sedih karena tidak bisa mengikuti pembelajaran bersama teman-temannya.

“Sebenarnya enak belajar langsung di sekolah. Bisa bertemu teman-teman, bisa tanya dan sharing pelajaran kalau tidak paham,” ujar Rizki, Senin (5/1/2026).

Menurut Rizki, pembelajaran daring juga memiliki sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan kuota internet. Ia mengaku pernah harus berpindah-pindah tempat demi mendapatkan akses internet. “Kalau tidak ada pulsa atau paket, kadang saya ke rumah teman yang ada Wi-Fi, kadang juga ke warung kopi,” katanya.

Ia berharap, banjir segera surut agar kegiatan belajar mengajar bisa kembali dilakukan di sekolah.

Kepala SD Negeri Kedungbanteng, Desi Ernawati, membenarkan bahwa pada hari pertama masuk sekolah setelah libur, pihaknya masih menerapkan pembelajaran daring demi keselamatan siswa. “Kami sudah berkoordinasi dengan pengawas dan Dinas Pendidikan. Keputusan ini sesuai aturan, karena yang utama adalah keselamatan anak-anak,” ujar Desi.

Ia menjelaskan, banjir yang merendam halaman sekolah dan akses jalan sudah terjadi sejak November lalu. Selain tergenang air, kondisi jalan menuju sekolah juga licin dan berbahaya bagi siswa. “Banjirnya mulai November sampai sekarang. Akses jalan, baik dari depan maupun belakang, sama-sama terendam dan licin,” jelasnya.

Meski demikian, pihak sekolah terus berupaya mencari solusi agar pembelajaran tatap muka dapat kembali dilakukan secara bertahap. Saat ini, sekolah memiliki total 136 siswa dari kelas I hingga VI. (md/rus)





Banjir di Sidoarjo.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pendaftaran Pilkades Serentak Sidoarjo Dibuka Tanggal 1 - 9 Pebruari 2026

Sidoarjo, Bhirawa

Panitia Pilkades serentak 2026 di Kabupaten Sidoarjo mendapat pembekalan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo, Selasa (6/1) kemarin, karena pendaftaran Pilkades serentak akan dimulai pada tanggal 1 - 9 Pebruari 2026.

Plt Kepala Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo, Probo Agus Sunarno SSos MSI, mengatakan panitia Pilkades serentak di 80 desa di Kabupaten Sidoarjo saat ini sudah terbentuk semua.

Menurut Probo, Pilkades serentak tahun 2026 akan berlangsung di 17 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Hanya 1 kecamatan yang tidak melaksanakan di tahun 2026 ini

yakni kecamatan Tulangan.

Jumlah anggota Pilkades serentak ini bervariasi. Paling sedikit 17 anggota dan paling banyak 27 anggota. Banyak dan sedikitnya tergantung pada jumlah daftar pemilih tetap (DPT) desa setempat.

"Pilkades akan dilaksanakan pada 24 juni. Kades yang terpilih akan dilantik pada 29 Juni 2026," kata Probo disela sela pembekalan kepada Panitia Pilkades serentak 2026, di ruang delta graha Setda Sidoarjo.

Dinas PMD Sidoarjo juga mengundang pihak Kodim 0816 Sidoarjo, Polresta Sidoarjo dan Garnisun, terkait netralitas dari TNI/Polri dalam Pilkades serentak 2026.

Probo memberi arahan, panitia Pilkades serentak harus meneliti dan

memverifikasi syarat administrasi pada calon Pilkades. Juga harus diseleksi kesehatan dan bebas dari Narkoba.

"Kades yang terpilih, masa perodenya 2026- 2032," kata Probo.

Kepala Bidang Pmdes Dinas PMD Sidoarjo, Ana Musarofah SSos MSI, mengucapkan alhamdulillah acara pembekalan kepada panitia Pilkades serentak 2026 telah berjalan lancar.

Pilkades serentak 2026 ini banyak diikuti oleh desa-desa di wilayah Kecamatan Candi. Ada 9 desa yang mengikutinya. Disusul Kecamatan Tanggulangin, Buduran, Waru dan Sidoarjo, masing-masing ada 7 desa.

"Coblosan langsung, tidak secara elektronik," kata Ana. Sesuai tata cara pencoblosan, 1 tempat pemungutan suara (TPS), harus melayani

sebanyak 500 DPT.

Kasi Pemerintahan Kecamatan Waru, Deny Kurniawan SSTP, dalam kesempatan itu mengatakan di kecamatan Waru ada 7 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak.

Diantarnya, Desa Pepelegi, Medaeng, Wadungasri, Kepuhkiriman, Kedungrejo dan Tambaksawah. Pembentukan panitia Pilkades serentak di Kecamatan Waru, mulai awal pembentukan sampai pelantikan, semuanya telah berjalan lancar.

Dalam kesempatan yang sama, Kasi Perekonomian Kecamatan Sedati, Ari Fajar Hidayat SSos, juga menyampaikan di Kecamatan Sedati ada 3 desa yang akan menggelar Pilkades serentak. Yakni Desa Pulungan, Pabean dan Kalanganyar. [kus.dre]

HARIAN
Bhirawa
Berita Sidoarjo dan Sekitarnya



Satpol PP Sidoarjo mengamankan salah satu reklame di ruas jalan utama.

Satpol PP Sidoarjo Tertibkan 38 Reklame

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo menertibkan 38 reklame dalam riat reklame insidental yang digelar selama dua hari.

senantiasa. Penertiban dilakukan di 10 titik ruas jalan utama di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Sidoarjo R. Novianto Koesno menjelaskan, penertiban menyoasar reklame komersial yang melanggar ketentuan perizinan dan perpajakan. Dari total 38 reklame yang ditertibkan, mayoritas ditemukan tidak membayar pajak dan izin telah habis masa berlakunya.

"Rinciannya, 13 reklame izin atau pajaknya habis, 23 reklame tidak membayar pajak, satu reklame rusak, dan satu lainnya dipindahkan," ujar Novianto. Penertiban tersebut dilakukan oleh enam personel regu reklame Satpol PP.

Novianto menambahkan, reklame yang ditertibkan terdiri atas 28 banner, tujuh spanduk, dan tiga baliho. Adapun lokasi penertiban meliputi Jalan Raya A. Yani, Jenggolo, Buduran, Tebel, Seruni, Gedangan, Aloha, Brigjen Katamso Waru, Ali Mas'ud, dan Pagerwojo. (cat/rus)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

56 Rumah Berdiri di Aset Pemerintah, Kejari Minta Klarifikasi Camat

Pemilik Bakal Dikenai Sistem Sewa

SIDOARJO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti keberadaan 56 rumah di tanah aset milik Pemkab Sidoarjo yang berlokasi di Kecamatan Taman. Aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo turun tangan dengan memeriksa pihak-pihak terkait. Ada kesepakatan bahwa persoalan dituntaskan dengan mekanisme sewa.

Kasi Intel Kejari Sidoarjo Hadi Sucipto tak menampik soal adanya pemeriksaan terkait tanah milik Pemkab. Namun perkara penyelidikan dihentikan karena sudah ada upaya Pemkab menindaklanjuti masalah. "Iya. Memang sempat ada," katanya.

Kejaksaan dikabarkan sempat memanggil Camat Taman untuk klarifikasi. Dia ditanya kronologi adanya lahan pemerintah yang disalahgunakan. Termasuk bagaimana asal usul 56 rumah yang berdiri di eks TKD.

Tunggu Penilaian Appraisal

Camat Taman Arie Prabowo menegaskan jika Kejari



PENYALAHGUNAAN: Pemkab bakal menerapkan sistem sewa bagi pemilik hunian tak berizin di Kecamatan Taman.

HUNIAN DI ASET PEMERINTAH

Ada 56 rumah yang berdiri di lahan aset

Hunian sudah dibangun bertahun-tahun

Pemkab akan menerapkan sistem sewa

Pemilik bersedia pindah jika lahan diminta pemerintah

hanya mengklarifikasi dan sudah ada pertemuan lanjutan yang mengundang semua pihak. Dari pertemuan terakhir, Bupati Sidoarjo, Kejari Sidoarjo, dan pemerintah kecamatan sepakat jika persoalan 56 rumah warga di atas eks TKD diselesaikan melalui mekanisme sewa.

"Kami masih menunggu

hasil dari BPKAD dan bagian hukum Pemkab," imbuhnya. Arie mengungkapkan, saat ini masih dilakukan penilaian appraisal atau nilai aset oleh BPKAD Sidoarjo. "Penilaian appraisal dilakukan untuk jangka waktu 10 tahun ke belakang dan 10 tahun ke depan. Warga sudah menyepakati pola sewa," tambah Arie.

Evaluasi Internal

Bupati Sidoarjo Subandi mengaku bakal mengevaluasi internalnya mengenai masalah tersebut. Menurut dia, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya ketegasan dan pengawasan sejak awal. Subandi mengaku telah berdialog dengan para pemilik bangunan untuk mencari solusi yang adil dan sesuai ketentuan hukum. (eza/ful/hen)



ANGGER SONOAN JAWA POS

LAMA SURUT: Pemkab siap membangun tanggul untuk mencegah banjir di TPU Delta Praloyo.

Banjir Rendam Ratusan Makam di TPU Delta Praloyo

SIDOARJO – Curah hujan yang tinggi membuat ratusan makam di TPU Delta Praloyo, di kawasan Jalan Lingkar Timur terendam banjir, kemarin (6/1). Ketinggian air mencapai sekitar 20 sentimeter hingga menyulitkan akses peziarah. Bahkan, satu prosesi pemakaman terpaksa dipindah ke area yang lebih tinggi.

Penjaga makam Mundu mengatakan genangan terjadi setiap musim hujan. Namun tahun ini kondisinya lebih parah. "Air berasal dari luapan sungai tanpa tanggul," katanya kemarin (6/1).

Saat banjir, pengelola harus mencari lokasi pemakaman alternatif.

Salah satu peziarah Ronald Lalaha mengaku kesulitan menziarahi makam keluarganya akibat genangan air. Dia berharap Pemkab Sidoarjo segera melakukan pengurukan.

Kepala Dinas Perkim CKTR Sidoarjo Bachruni Aryawan menyebut solusi jangka panjang perlu disiapkan. Salah satunya dengan pembangunan tanggul permanen di sekitar area makam. "Selama ini tanggulnya dari tanah, tapi itu tugasnya dinas PU," jelasnya. (ful/hen)